



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4521-4527

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Shelter Tourism: Konsep Wisata Edukasi Mitigasi Bencana untuk Destinasi Tangguh

Tri Wartono¹, Adya Hermawati², Rizki Dwi Ariyanto³

Program Pascasarjana, Magister Manajemen, Universitas Widya Gama Malang
trey.wart@gmail.com, wati_wati38@yahoo.co.id, rizkidwiariyanto@gmail.com,

Abstrak

Shelter Tourism merupakan inovasi pariwisata berbasis mitigasi bencana yang memanfaatkan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) sebagai destinasi wisata edukasi. Konsep ini menggabungkan fungsi utama sebagai lokasi evakuasi dengan aktivitas wisata alam, camping, hingga simulasi kebencanaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi dan tantangan implementasi Shelter Tourism di Indonesia melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shelter Tourism mampu menjadi sarana diversifikasi produk wisata, edukasi kesiapsiagaan bencana, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian, yaitu ketiadaan standar indikator kesiapan, minimnya riset implementasi, dan kurangnya model bisnis yang menjamin keberlanjutan. Artikel ini merekomendasikan pengembangan indikator destinasi berbasis shelter, evaluasi dampak sosial-ekonomi, serta replikasi Shelter Tourism di destinasi rawan bencana lainnya.

Kata kunci: Shelter Tourism, Pariwisata Tangguh, Mitigasi Bencana, Community-Based Tourism, Indonesia.

1. Latar Belakang

Salah satu sektor utama di Indonesia, pariwisata, berkontribusi besar pada perekonomian negara melalui pertukaran asing dan penciptaan lapangan kerja [1], [2]. Namun demikian, berbagai gangguan eksternal, terutama bencana alam, sangat mengancam sektor ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik, atau *Ring of Fire*. Ini memiliki banyak risiko bencana yang kompleks, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem [3]. Indonesia memiliki tingkat kerawanan tertinggi di dunia, dengan lebih dari 3.000 insiden bencana per tahun dalam lima tahun terakhir, menurut data BNPB [4].

Bencana alam mengganggu pariwisata. Ketika gempa atau letusan gunung berapi terjadi, tempat wisata harus ditutup, wisatawan harus dievakuasi, dan masyarakat lokal kehilangan pekerjaan mereka. Kondisi ini menjadi lebih buruk pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menurunkan kunjungan wisatawan asing hingga 75% dibandingkan tahun sebelumnya. Kerentanan pariwisata terhadap bencana masih tinggi, meskipun jumlah kunjungan kembali meningkat pada 2022–2023. Hal ini menunjukkan bahwa strategi baru diperlukan yang fokus pada pertumbuhan dan ketahanan.

Tabel 1. Data Bencana dan Pariwisata Indonesia (2019–2023)

Tahun	Jumlah Bencana (BNPB)	Wisatawan Mancanegara (juta)	Wisatawan Nusantara (juta)	Dampak Utama pada Pariwisata
2019	3.721	16,1	283,2	Pertumbuhan positif sebelum pandemi
2020	2.925	4,0	198,0	Pandemi COVID-19, penurunan tajam
2021	3.058	1,6	275,0	Pembatasan perjalanan dan penutupan destinasi
2022	3.544	5,9	703,0	Pemulihan pasca pandemi
2023	3.383	11,7	800,0	Pemulihan penuh, tetap rawan bencana

Sumber: BNPB (2023), Kemenparekraf (2023)

Frekuensi bencana relatif tinggi dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukkan oleh data pada tabel di atas. Di sisi lain, jumlah wisatawan yang terpengaruh oleh pandemi dan bencana sangat berbeda. Meskipun jumlah wisatawan domestik dan asing kembali meningkat pada tahun 2022–2023, kondisi tersebut tidak menghilangkan risiko gangguan bencana bagi sektor pariwisata. Oleh karena itu, dibutuhkan metode baru yang dapat mengimbangi pemulihan pariwisata dan pengurangan risiko.

Shelter Tourism adalah salah satu pendekatan baru. Konsep ini memanfaatkan infrastruktur evakuasi bencana untuk destinasi wisata edukasi. Infrastruktur ini termasuk Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA). Dalam keadaan normal, fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk kegiatan wisata alam, camping, camper van, atau simulasi kebencanaan, tetapi saat bencana terjadi, mereka tetap berfungsi sebagai tempat perlindungan. Jadi, *Shelter Tourism* melakukan dua hal: membantu kesiapsiagaan bencana dan membuat produk wisata baru yang fokus pada edukasi dan pengalaman langsung.

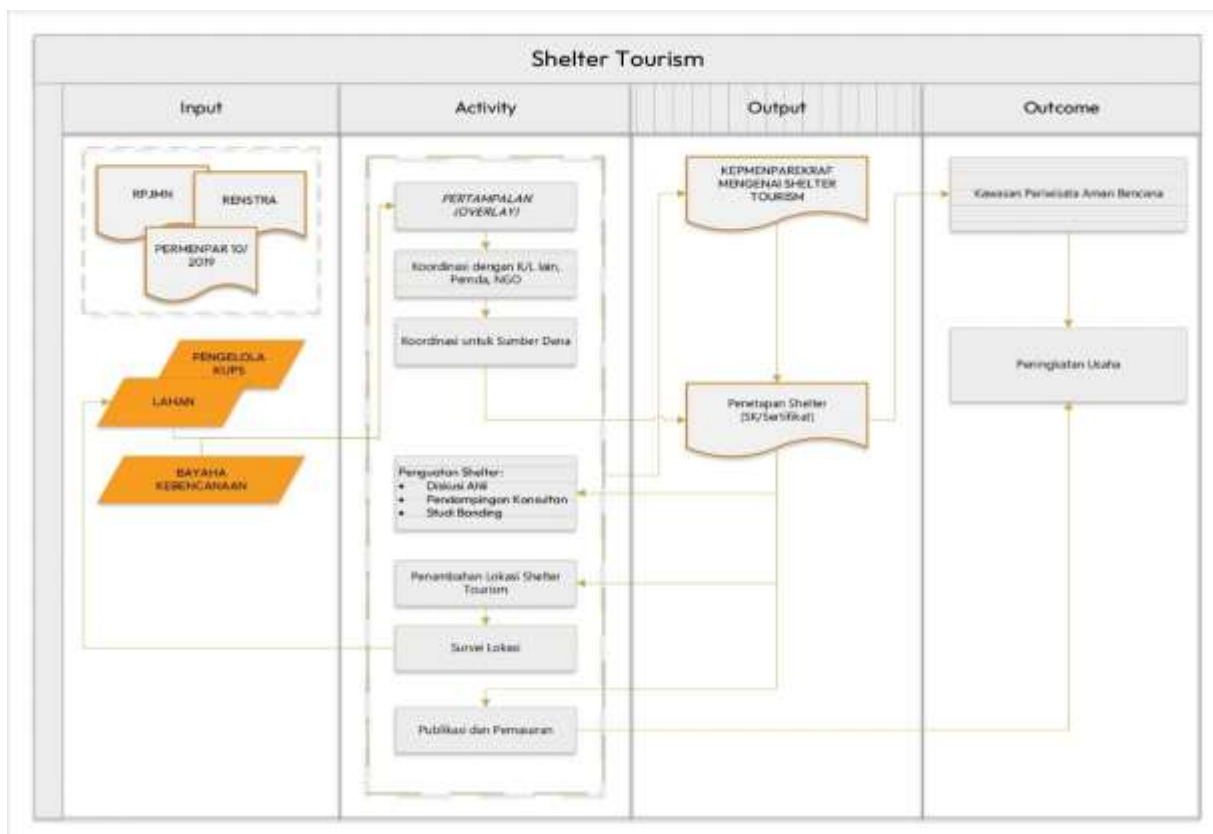
Penelitian telah menunjukkan bahwa integrasi antara pariwisata dan mitigasi bencana sangat penting. [5] menggarisbawahi gagasan tentang wisata yang tahan terhadap krisis, yang menekankan potensi pemulihan destinasi. Sementara [6] menekankan bagaimana masyarakat membangun kapasitas adaptif, [7] dan [8] menunjukkan bahwa wisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi di wilayah rawan bencana. Selain itu, penelitian global seperti [9] menekankan hubungan erat antara rekreasi dan bencana dan kebutuhan akan pendekatan transformatif. Namun, penelitian yang dilakukan secara khusus mengenai *Shelter Tourism* sebagai praktik praktis di Indonesia masih sangat terbatas.

Terdapat beberapa perbedaan utama, menurut analisis literatur yang dilakukan. Pertama, belum ada standar untuk mengukur kesiapan destinasi yang berbasis *shelter*. Kedua, belum ada penelitian yang cukup untuk mengukur seberapa efektif wisata *shelter* secara empiris, dan ketiga, belum ada model bisnis yang dapat menjamin keberlanjutan sosial dan keuangan dari gagasan ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep *Shelter Tourism* di Indonesia, menganalisis peluang dan tantangan untuk menerapkannya, dan menemukan celah penelitian sebagai dasar saran untuk pengembangan destinasi pariwisata yang tahan terhadap bencana di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan untuk mengkaji potensi serta tantangan implementasi *Shelter Tourism* di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena konsep *Shelter Tourism* masih relatif baru dan uji coba implementasinya masih terbatas, sehingga diperlukan penelusuran komprehensif terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, dan penelitian akademik yang relevan.

Sumber data primer berasal dari dokumen kebijakan nasional, antara lain Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Destinasi Pariwisata Aman Bencana serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang memuat arah kebijakan pariwisata berkelanjutan [10]. Data tambahan diperoleh dari dokumen konsep *Shelter Tourism*, kerangka pemikiran resmi yang disusun oleh Kemenparekraf, serta laporan uji coba di Desa Sumberejo, Kota Batu. Data sekunder berupa laporan BNPB (2019–2023) dan Kemenparekraf tentang tren bencana dan pariwisata turut digunakan sebagai konteks analisis.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Shelter Tourism
 Sumber: Permenpar 10/2019, RPJMN/RENSTRA

Kerangka pemikiran *Shelter Tourism* menjadi dasar alur analisis dalam penelitian ini. Kerangka tersebut terdiri dari empat tahapan: **input**, **activity**, **output**, dan **outcome**. Pada tahap *input*, aspek yang diperhatikan mencakup kekuatan regulasi (Permenpar 10/2019, RPJMN/RENSTRA), kelembagaan pengelola (KUPS/KTH), ketersediaan lahan, kondisi kebencanaan, serta peta pertampalan (*overlay*). Tahap *activity* mencakup diskusi ahli, pendampingan konsultan, studi banding, survei lokasi, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta publikasi dan pemasaran. Hasil dari kegiatan ini menghasilkan *output* berupa penetapan shelter (SK/sertifikat), peningkatan usaha, serta koordinasi sumber dana. Pada tahap akhir (*outcome*), yang diharapkan adalah terbentuknya kawasan pariwisata aman bencana, publikasi luas, dan penambahan lokasi Shelter Tourism di wilayah lain.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan *gap analysis*. Teknik ini digunakan untuk membandingkan kondisi aktual *Shelter Tourism* di Indonesia dengan praktik ideal atau *best practices* di negara lain (Jepang, Korea Selatan, Vietnam). Dengan mengintegrasikan kerangka pemikiran Shelter Tourism dalam analisis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan konsep secara konseptual, tetapi juga menilai sejauh mana tahapan input–aktivitas–output–outcome sudah terlaksana di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki untuk mendorong keberlanjutan model ini di masa depan.

3. Hasil dan Diskusi

Konsep *Shelter Tourism* di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk mengoptimalkan infrastruktur evakuasi bencana yang selama ini jarang dimanfaatkan di luar kondisi darurat. Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) memiliki fungsi vital sebagai titik perlindungan ketika terjadi bencana, namun pada situasi normal fasilitas tersebut cenderung tidak produktif. Gagasan pemanfaatan *idle infrastructure* ini kemudian diwujudkan melalui *Shelter Tourism*, yang menawarkan wisata berbasis edukasi kebencanaan, seperti simulasi tanggap darurat, demonstrasi keselamatan, dan permainan mitigasi, di samping atraksi wisata alam seperti camping dan camper van. Proyek percontohan di Desa Sumberejo, Kota Batu, menjadi salah satu model awal penerapan konsep ini dengan memadukan edukasi mitigasi dan rekreasi berbasis masyarakat.

Secara kelembagaan, *Shelter Tourism* di Sumberejo dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Hijau Lestari dengan 545 kepala keluarga dan lahan garapan seluas 243 hektar. Lahan tersebut mencakup kawasan pertanian, hutan rakyat, serta ruang terbuka yang dapat difungsikan sebagai area wisata. Kapasitas daya tampung dihitung

untuk 700 wisatawan pada kondisi normal, dan tetap mampu menampung hingga 1.400 orang pengunjung apabila terjadi bencana. Hal ini menunjukkan perencanaan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek pariwisata dan fungsi evakuasi.

Dari sisi usaha, *Shelter Tourism* di Sumberejo dikembangkan dengan beragam unit ekonomi lokal. Beberapa program utama mencakup glamping area, restoran, UMKM pangan dan kerajinan, *rope course*, *camping ground*, hingga pelatihan edukasi kebencanaan. Aktivitas yang ditawarkan meliputi agrowisata, *fun outbound*, *trekking*, petik hasil kebun, hingga edukasi mitigasi bencana. Dengan demikian, *Shelter Tourism* tidak hanya menghadirkan pengalaman rekreasi, tetapi juga menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Aspek penting lain adalah penerapan 9 prinsip mitigasi yang menjadi landasan operasional *Shelter Tourism*, yaitu: (1) cepat dan tepat, (2) prioritas, (3) koordinasi dan keterpaduan, (4) berdaya guna dan berhasil guna, (5) transparansi dan akuntabilitas, (6) kemitraan, (7) pemberdayaan, (8) non diskriminatif, dan (9) non proletisi. Prinsip-prinsip ini diadaptasi ke dalam pengelolaan destinasi untuk memastikan bahwa fungsi utama shelter sebagai ruang evakuasi tidak terganggu oleh aktivitas pariwisata.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, *Shelter Tourism* di Indonesia masih berada pada tahap awal. Jepang telah mengembangkan *Life Safety Learning Center* di Tokyo sebagai destinasi edukasi bencana berbasis simulasi, sedangkan Korea Selatan menjadikan *safety tourism* sebagai bagian dari kurikulum pendidikan sekolah. Vietnam juga mengintegrasikan wisata alam dengan pendidikan kebencanaan komunitas [11], [12]. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempercepat upaya pengembangan *Shelter Tourism* agar dapat mencapai tahap yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 2. Komponen *Shelter Tourism* Desa Sumberejo

Aspek	Rincian Utama
Pengelola	KTH Hijau Lestari (545 KK, lahan 243 ha)
Kapasitas	700 wisatawan normal / 1.400 pengunjung
Jenis Usaha	Glamping, resto, UMKM, rope course, camping ground
Aktivitas Wisata	Agrowisata, fun outbound, trekking, edukasi kebencanaan
Prinsip Mitigasi	9 prinsip: cepat-tepat, prioritas, koordinasi, berdaya guna, transparansi, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, non proletisi

Sumber: Kemenparekraf, KTH Hijau Lestari, 2023

Dengan detail tersebut, jelas bahwa *Shelter Tourism* di Sumberejo bukan sekadar konsep, melainkan sebuah model praktik yang menggabungkan fungsi evakuasi dengan pariwisata berbasis masyarakat. Keberhasilan implementasi model ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas, dukungan kebijakan lintas lembaga, serta inovasi dalam pengelolaan usaha agar tetap berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Selain aspek kelembagaan, kapasitas, dan aktivitas wisata, dokumen *Shelter Tourism* Desa Sumberejo juga menekankan pentingnya strategi pemasaran. Sasaran pasar potensial yang diidentifikasi sangat relevan dengan tren pariwisata saat ini, khususnya wisata berbasis pengalaman dan edukasi.

Pertama, generasi milenial menjadi target utama karena segmen ini dikenal memiliki minat tinggi pada aktivitas *outdoor*, petualangan, dan wisata berbasis komunitas. Minat milenial terhadap *glamping*, *camper van*, serta kegiatan berbasis alam sejalan dengan produk utama *Shelter Tourism*. Selain itu, generasi ini juga lebih peduli pada isu keberlanjutan dan kesiapsiagaan, sehingga *Shelter Tourism* dapat menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan wisata mereka sekaligus menumbuhkan kesadaran kebencanaan.

Kedua, lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas menjadi pasar potensial berikutnya. Melalui program *field trip* atau kegiatan ekstrakurikuler, *Shelter Tourism* dapat menjadi laboratorium alam bagi siswa dan mahasiswa untuk mempelajari mitigasi bencana secara langsung. Hal ini sejalan dengan praktik di Jepang dan Korea Selatan, di mana wisata edukasi kebencanaan telah terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan.

Ketiga, desa wisata dan kelompok masyarakat yang memiliki destinasi sejenis dapat menjadi mitra sekaligus pasar untuk pengembangan jaringan *Shelter Tourism*. Melalui kolaborasi antardesa wisata, konsep ini berpotensi direplikasi di berbagai lokasi rawan bencana di Indonesia. Dengan demikian, *Shelter Tourism* tidak hanya menjadi produk wisata tunggal, tetapi juga bagian dari ekosistem pariwisata tangguh bencana yang lebih luas.

Tabel 3. Sasaran Pasar *Shelter Tourism* Desa Sumberejo

Sasaran Pasar	Karakteristik Utama	Kesesuaian dengan Shelter Tourism
Generasi Milenial	Pecinta alam, wisata <i>outdoor</i> , peduli isu keberlanjutan	Tertarik pada <i>glamping</i> , <i>camper van</i> , simulasi bencana
Lembaga Pendidikan	Sekolah dan universitas, kegiatan <i>field trip</i>	Shelter Tourism sebagai laboratorium edukasi mitigasi
Desa Wisata / Komunitas	Destinasi lokal dengan potensi kolaborasi	Replikasi konsep di wilayah rawan bencana

Sumber: Kemenparekraf, KTH Hijau Lestari, 2023

Dengan penetapan sasaran pasar yang jelas, Shelter Tourism memiliki peluang besar untuk mengisi ceruk wisata yang masih jarang tersentuh, yaitu wisata edukasi kebencanaan berbasis masyarakat. Jika strategi pemasaran ini diintegrasikan dengan dukungan digitalisasi pariwisata dan promosi lintas platform, *Shelter Tourism* dapat tumbuh menjadi model destinasi unik sekaligus tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Keterkaitan erat antara bencana dan pariwisata di Indonesia dapat dilihat melalui data BNPB dan Kemenparekraf dalam periode 2019–2023. Selama lima tahun terakhir, jumlah bencana tercatat relatif stabil di atas 3.000 kejadian per tahun, sementara jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 mencatat penurunan drastis kunjungan wisatawan mancanegara hingga hanya 4 juta akibat pandemi COVID-19, sementara wisatawan nusantara juga turun menjadi 198 juta. Pada tahun 2022 dan 2023, angka kunjungan wisatawan kembali meningkat, namun tingkat kerentanan tetap tinggi karena bencana terus terjadi.



Gambar 2. Tren jumlah bencana dan kunjungan wisatawan di Indonesia 2019–2023

Sumber: BNPB 2023; Kemenparekraf 2023

Grafik pada Gambar 2. memperlihatkan korelasi yang jelas: meskipun frekuensi bencana tidak mengalami penurunan signifikan, jumlah wisatawan sangat bergantung pada stabilitas situasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa strategi adaptif, sektor pariwisata akan selalu berada dalam posisi rentan. *Shelter Tourism* menawarkan jalan keluar dengan menjadikan pariwisata sebagai bagian dari strategi mitigasi, bukan hanya sebagai sektor yang terdampak. Dengan memanfaatkan infrastruktur evakuasi sebagai destinasi wisata, sektor pariwisata dapat tetap berjalan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Dari sisi kebijakan, konsep ini mendapat legitimasi melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang destinasi aman bencana, yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan di setiap destinasi wisata. Selanjutnya, RPJMN 2020–2024 turut menekankan perlunya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada mitigasi risiko. Namun demikian, implementasi *Shelter Tourism* menghadapi tantangan koordinasi, karena kewenangan utama atas TES dan TEA berada di bawah BNPB. Hal ini menuntut sinergi antara Kemenparekraf, BNPB, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, *Shelter Tourism* di Indonesia masih berada pada tahap awal. Jepang, misalnya, telah mengembangkan *Life Safety Learning Center* di Tokyo sebagai destinasi edukasi bencana

berbasis simulasi yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dan pariwisata lokal. Korea Selatan mengadopsi pendekatan serupa melalui *safety tourism*, di mana siswa sekolah dilibatkan dalam program wisata edukasi kebencanaan yang juga memperkenalkan budaya lokal. Sementara di Vietnam, model wisata alam digabungkan dengan pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran komunitas (Nguyen & Bui, 2022). Ketiga negara tersebut telah berhasil memposisikan pariwisata sebagai sarana pembelajaran kebencanaan yang sistematis, sedangkan Indonesia baru pada tahap inisiasi dan uji coba konsep.

Tabel 4. Perbandingan *Shelter Tourism* di Indonesia dan Praktik Internasional

Negara	Bentuk Implementasi	Kekuatan Utama	Tantangan yang Masih Dihadapi
Indonesia	Pemanfaatan TES/TEA sebagai destinasi wisata edukasi (contoh: Desa Sumberejo, Batu)	Potensi diversifikasi produk wisata dan pemberdayaan masyarakat	Belum ada standar, koordinasi lintas lembaga, dan model bisnis berkelanjutan
Jepang	<i>Life Safety Learning Center</i> dengan simulasi kebencanaan terintegrasi	Edukasi bencana berbasis pengalaman, sistematis dan berkelanjutan	Biaya operasional tinggi, perlu pembaruan teknologi secara berkala
Korea Selatan	<i>Safety tourism</i> melalui program sekolah dan pusat edukasi	Integrasi pendidikan formal dengan wisata mitigasi	Ketergantungan pada subsidi pemerintah
Vietnam	Wisata alam dengan muatan pendidikan kebencanaan komunitas	Peningkatan kesadaran lokal, berbasis <i>community-driven</i>	Keterbatasan infrastruktur dan dukungan kebijakan jangka panjang

Sumber:[5], [8], [11]

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi gap besar dalam hal standarisasi, riset implementasi, dan keberlanjutan finansial. Jepang dan Korea Selatan telah menempatkan edukasi kebencanaan sebagai bagian integral dari sistem wisata dan pendidikan, sedangkan Vietnam menekankan peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran. Dengan demikian, peluang Indonesia terletak pada penguatan basis komunitas sekaligus membangun standar nasional yang dapat diadopsi lintas destinasi rawan bencana [13].

Selain itu, *Shelter Tourism* di Indonesia juga menawarkan peluang ekonomi lokal yang signifikan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pengelola utama, program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat kapasitas adaptif komunitas. Namun, tantangan besar yang perlu diatasi adalah bagaimana memastikan konsep ini tidak hanya menjadi proyek percontohan, melainkan dapat direplikasi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional pariwisata tangguh bencana [14].

Berikutnya, selain aspek kelembagaan, kapasitas, aktivitas wisata, dan sasaran pasar, dokumen konsep menekankan bahwa *Shelter Tourism* memiliki manfaat strategis jangka panjang. Pertama, program ini dirancang sebagai role model nasional untuk pengembangan destinasi pariwisata tangguh bencana. Desa Sumberejo dipilih sebagai lokasi uji coba dengan harapan konsep tersebut dapat direplikasi ke wilayah rawan bencana lain di Indonesia. Kedua, *Shelter Tourism* juga mendukung pencapaian target pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2020–2024 dan RENSTRA Kemenparekraf, khususnya dalam aspek keberlanjutan dan keamanan destinasi. Ketiga, keberadaan *Shelter Tourism* di Batu memberikan nilai tambah berupa branding Kota Batu sebagai destinasi aman bencana, sehingga memperkuat daya saing pariwisata lokal sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Selain manfaat strategis, dokumen juga menegaskan pentingnya detail teknis tata ruang dan zonasi untuk memastikan keamanan. Setiap lokasi shelter harus memperhatikan overlay peta rawan bencana, sehingga penempatan fasilitas wisata tidak mengganggu jalur evakuasi maupun fungsi utama shelter. Misalnya, area untuk glamping, *rope course*, dan camping ground ditempatkan di zona aman yang tidak dilalui jalur evakuasi, sementara ruang evakuasi tetap steril dari bangunan permanen. Dengan demikian, wisata dapat berjalan tanpa mengurangi kesiapan lokasi untuk beralih fungsi menjadi tempat perlindungan saat bencana.

Langkah teknis lain yang diatur adalah penyediaan simulasi jalur evakuasi dan penunjuk arah yang jelas di kawasan *Shelter Tourism*. Wisatawan yang berkunjung diharapkan bukan hanya menikmati pengalaman rekreasi, tetapi juga memahami bagaimana prosedur evakuasi dilakukan [15]. Hal ini menjadikan *Shelter Tourism* bukan sekadar destinasi, melainkan juga media edukasi yang langsung melibatkan pengunjung dalam praktik kesiapsiagaan.

Dengan adanya manfaat strategis dan detail teknis ini, *Shelter Tourism* tidak hanya relevan sebagai inovasi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan pariwisata berbasis mitigasi bencana. Penerapan konsep ini di Desa Sumberejo dapat menjadi pijakan awal menuju pembentukan standar nasional *Shelter Tourism* di Indonesia.

4. Kesimpulan

Shelter Tourism merupakan inovasi strategis yang berupaya mengintegrasikan pariwisata dengan mitigasi bencana melalui pemanfaatan infrastruktur evakuasi yang ada. Konsep ini menawarkan fungsi ganda, yaitu sebagai sarana evakuasi pada saat terjadi bencana dan sebagai destinasi wisata edukasi pada kondisi normal. Dari hasil kajian, konsep ini memiliki potensi besar dalam mendiversifikasi produk wisata, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Meskipun demikian, implementasi *Shelter Tourism* di Indonesia masih berada pada tahap awal dan menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi ketiadaan standar indikator kesiapan destinasi, keterbatasan penelitian empiris terkait efektivitas program, serta belum adanya model bisnis yang dapat menjamin keberlanjutan finansial dan sosial. Selain itu, koordinasi lintas lembaga antara Kemenparekraf, BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat agar pemanfaatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berjalan secara sinergis. Dibandingkan dengan praktik di negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, Indonesia masih memiliki gap besar dalam hal integrasi *Shelter Tourism* dengan kebijakan pendidikan maupun sistem wisata nasional. Negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa wisata edukasi kebencanaan dapat menjadi bagian dari sistem pembelajaran formal dan pariwisata berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempercepat langkah untuk mengembangkan model yang serupa namun disesuaikan dengan konteks lokal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan pengembangan standar nasional *Shelter Tourism* yang memuat indikator kesiapan, keamanan, dan keberlanjutan destinasi. Kedua, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada evaluasi empiris implementasi, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Ketiga, perlu disusun model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga *Shelter Tourism* dapat mandiri secara finansial tanpa bergantung penuh pada dana pemerintah. Keempat, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku wisata, dan komunitas lokal perlu diperkuat agar konsep ini dapat direplikasi di berbagai destinasi rawan bencana di Indonesia.

Referensi

- [1] A. Hermawati, C. Anam, S. Suwarta, and W. Wulandari, "Capaian Kinerja Pemasaran Berbasis Marketing Terintegrasi Melalui Analisis Path Pada Ukm Industri Pariwisata Di Jawa Timur," *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 12, no. 2, p. 291, 2023.
- [2] A. Hermawati, A. T. Sembhodo, and N. M. Panunjul, "Identifikasi Aspek Strategi Manajemen Terpadu Sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Ukm Industri Pariwisata," *J. Ekon. Pembang. STIE Muhammadiyah Palopo*, vol. 10, no. 2, p. 399, 2024.
- [3] I. D. Wardani and S. P. Nugroho, "Disaster preparedness in Indonesian tourism villages," *Indones. J. Tour. Leis.*, vol. 2, no. 1, pp. 10–24, 2021.
- [4] BNPB, *Buku Data Bencana Indonesia 2023*. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023.
- [5] S. Becken and D. Scott, "Tourism and climate change stocktake: a call to action," *J. Sustain. Tour.*, vol. 32, no. 9, pp. 2018–2038, 2024.
- [6] D. Biggs, C. M. Hall, and N. Stoeckl, "The resilience of formal and informal tourism enterprises to disasters: Reef tourism in Phuket, Thailand," *J. Sustain. Tour.*, vol. 20, no. 5, pp. 645–665, 2012.
- [7] T. T. S. Tran, N. Németh, M. S. I. Sarker, Y. Zhang, and A. N. Nhat, "Community-Based Tourism in Southeast Asia," pp. 309–327, 2024.
- [8] F. Rahmafritria, V. Sukmayadi, K. Suryadi, and A. Rosyidie, "Disaster management in Indonesian tourist destinations: how institutional roles and community resilience are mediated," *Worldw. Hosp. Tour. Themes*, vol. 13, no. 3, pp. 324–339, 2021.
- [9] D. Hardilla, K. H. Basuki, F. Rusmiati, and C. Persada, "The Tourism Concept of Emergency Shelter: Strategies for Community Resilience in The Coastal Area of South Lampung," *Proc. Int. Conf. Sustain. Biomass (ICSB 2019)*, vol. 202, no. Icsb 2019, pp. 126–130, 2021.
- [10] I. K. Pariwisata, *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata*. Indonesia, 2019.
- [11] B. D. Vu, H. T. Nguyen, H. T. Dinh, Q. N. Nguyen, and X. Van Ha, "Natural Disaster Prevention Literacy Education among Vietnamese High School Students," *Educ. Sci.*, vol. 13, p. 262, 2023.
- [12] F. Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Pertama., vol. 7. Ponorogo, Jawa Timur Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- [13] A. Hermawati, Suhermin, and R. P. S., "Peran Penting Optimalisasi Kinerja Sdm Terintegrasi Terhadap Competitive Sustainability Tourism Pada UMKM Sektor Pariwisata Di Jawa Timur," *Conf. Innov. Appl. Sci. Technol. (CIASTECH 2018)*, no. September, pp. 110–118, 2018.
- [14] A. Hermawati, C. Anam, S. Suhermin, and R. P. Suci, "Efektivitas Pengembangan Sektor Pariwisata Jawa Timur Dengan Pendekatan Human Resources Strategy Dan Marketing Strategy," *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 9–25, 2020.
- [15] A. Hermawati and A. Tuwuh Sembhodo, "Effects of integrated HRM on the optimization of marketing performance in the SMEs tourism industry," *J. Inov. Ekon.*, vol. 07, no. 02, pp. 117–126, 2022.